



Pencegahan Korupsi Melalui Pendalaman Karakter Dalam Model Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi

Nyoman Asri Mahadhyaksa

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : asri.mahadhyaksa@undiksha.ac.id

*Korespondensi Penulis

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: 1 January 2022

Direvisi: 12 Maret 2022

Diterima: 1 April 2022

Keywords:

Anti-Corruption

Education, Character

Education, Corruption

Prevention.

Abstrak

Upaya-upaya yang bersifat yudisial seperti membenah sistem hukum dalam menangani tindak pidana korupsi terbukti kurang dalam membangkitkan kesadaran terhadap tindakan yang melanggar hukum tersebut bagi individu yang gemar melakukan korupsi, sebab di dalam diri pelaku korupsi sudah tertanam pola pikir yang *materialistis* dan *egoistis*. Oleh sebab itu alih-alih terus memperbaharui sistem hukum terkait korupsi, ada baiknya untuk memperbaiki hal-hal kecil yang dapat menyebabkan individu memiliki keinginan untuk korupsi. Salah satunya adalah membenah terhadap pendidikan karakter yang didukung pula dengan pendidikan anti korupsi. Sebagai *agen of change* dan elemen masyarakat, mahasiswa harus dibekali dengan pendalaman karakter dan pendidikan anti korupsi agar dapat menumbuhkan pola pikir yang anti terhadap korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan korupsi melalui pendalaman pendidikan karakter di dalam model pendidikan anti korupsi pada perguruan tinggi, dimana penelitian ini menggunakan analisis deskriptif berdasar kepada bahan-bahan kepustakaan

Abstract

Efforts of a judicial nature such as reforming the legal system in dealing with criminal acts of corruption have proven to be lacking in creating an optimizing awareness of unlawful acts for individuals who are fond of committing corruption, because within teh perpetrators of corruption are instilled a mindset that is materialistic and egotistical. Therefore instead of continuing to update the legal system related to corruption, it is better to fix the small things that can cause individuals to have a desire for corruption. One of them is the improvement of character education which is also supported by anti-corruption education. As agents of change and elements of society, students must be equipped with character education and anti-corruption education so that they can foster an anti- corrupt mindset. The purpose of this research to explore efforts that can be made to minimize corruption through deepening character education in the anti-corruption education model in tertiary institutions, where this research uses descriptive analysis based on library materials.

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

✉ Alamat korespondensi:

¹Fakultas Hukum dan Ilmu social,

E-mail : asri.mahadhyaksa@undiksha.ac.id

P-ISSN : 2714-7967

E-ISSN : 2722-8304

PENDAHULUAN

Arah daripada maksud ingin membentuk kecerdasan pada masyarakat dalam bangsa Indonesia merupakan suatu cita-cita para proklamator untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih maju dengan menghasilkan suatu potensi masyarakat bangsa yang dapat bersaing di dunia tentunya. Pemikiran ini termaktub di dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga hal tersebut merupakan sesuatu yang tentunya menjadi pekerjaan yang krusial bagi para penerus bangsa Indonesia. Amanat para proklamator ini tidak semata-mata dibuat sebagai bagian untuk mengisi pembukaan Undang-Undang Dasar agar lebih harmonis, namun tentunya para proklamator menginginkan bahwa masyarakat bangsa Indonesia dapat menyandang peran sebagai individu dengan kecerdasan diwarnai karakter kebangsaan yang kuat. Ini artinya bahwa di dalam kecerdasan yang menjadi harapan pendahulu, juga tersirat bahwa kecerdasan tersebut harus diimbangi dengan karakter yang berdasar kebangsaan sehingga mendapati potensi-potensi yang berkedudukan pada pikiran dan akhlak.

Untuk mewujudkan harapan para pendahulu ini tentunya generasi selanjutnya menciptakan suasana pendidikan Indonesia yang lebih maksimal didapatkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Pada era selanjutnya paradigma pendidikan bergeser dari yang sebelumnya hanya bisa di dapatkan bagi warga dengan taraf hidup tinggi berubah menjadi pendidikan yang sama bagi seluruh warga Indonesia, hal ini tentunya membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi kehidupan pendidikan di Indonesia. Indonesia mulai membangun banyak sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat. Namun yang menjadi masalah disini, setelah pendidikan tersebut berhasil untuk digalakkan, kembali muncul pemikiran-pemikiran bahwa pendidikan yang di kembangkan Indonesia menghasilkan generasi yang berorientasi kepada sifat-sifat yang kurang mencerminkan sikap kebangsaan. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan cita-cita bangsa yang mengedepankan karakter sebagai pembentuk kecerdasan bagi bangsa Indonesia.

Tampaknya pendidikan yang kembangkan di Indonesia memiliki kiblat pendidikan yang mengacu kepada hal-hal yang mengarah kepada keduniawian dan *individualistik*. Sehingga muncul pemikiran-pemikiran bahwa perangai seseorang, *humanism*, karakter yang berbudi tersebut hilang sebab dalam kependidikan hanya memberatkan hal didalamnya untuk penanaman kecerdasan, penalaran, dan akal selain mengimbangi juga emosi, karakter, dan perasaan dari individu itu sendiri.¹ Akibatnya terjadi ketidaksinambungan antara kecerdasan dengan karakter dari individu itu sendiri, oleh sebab itu melahirkan banyak generasi yang hanya memikirkan intelektual dan akal tanpa adanya karakter dan hati Nurani. Ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang bersikap *egoistis*.

Karakter dikatakan penting dalam suatu pendidikan sebab karakter dapat mengendalikan dan membentuk pola pikir individu dalam menggunakan intelektual dan

¹ Kadir, Y. (2018). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi . *Gorontalo Law Review Volume 1, Nomor 1*, halaman 26

akalnya dalam melakukan tindakan, yang mana seharusnya pengenalan karakter ini dimulai sejak usia dini karena individu mulai mengamati dan mengenali tindakan sejak usianya masih sangat belia. Oleh sebab itu lingkungan tempat individu bertumbuh harus diwarnai dengan pendidikan karakter, sehingga tercipta individu yang memiliki karakter baik. Adapun suatu individu dapat dikatakan memiliki karakter yang baik adalah seseorang yang dapat membuat suatu kebijakan dengan mempertanggung-jawabkan segala sesuatu yang akan terjadi sebagai akibat dari kebijakannya tersebut.² Karakter yang dimiliki individu ini juga dapat dijadikan sebagai identitas atau jati diri bangsa, Scerenko mendefinisikan karakter dapat menciptakan perbedaan pribadi, citi etis dalam suatu kelompok bahkan bangsa.³ Oleh sebab itu para pendahulu ingin menciptakan kecerdasan warga negaranya dengan mementingkan karakter sebagai bagian pendukung utamanya.

Keprihatinan terhadap karakter ini membuat pemerintah Indonesia gencar untuk memberikan kebijakan pendidikan karakter pada semua tingkat pendidikan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tak sedikit masyarakat Indonesia telah terbunuh karakternya. Hal ini dapat dilihat dalam maraknya kasus-kasus yang terbilang cukup memperlihatkan bahwa banyak masyarakat Indonesia tidak terlalu mementingkan karakter dalam menjalankan kehidupannya. Salah satu kasus yang mencerminkan hilangnya karakter sebagian masyarakat Indonesia adalah kasus korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian banyak pihak, namun dapat menguntungkan diri sendiri. Karakter egoistik ini tidak serta merta tiba-tiba muncul, tentunya banyak pengaruh yang mendasari, salah satunya kurangnya pendalaman karakter yang didapatkannya dalam masa-masa peralihan di hidupnya.

Selama bertahun-tahun pemerintah Indonesia mencoba untuk melakukan pembenahan terhadap sistem hukum agar tidak terjadi kasus korupsi yang kian merajalela. Selain itu pemerintah Indonesia juga telah menciptakan badan hukum yang khusus untuk menangani permasalahan kasus korupsi ini agar segera terselesaikan, namun kasus korupsi di Indonesia tak kunjung henti bahkan Indonesia ditempatkan sebagai negara nomor 6 dari 133 negara yang memiliki persentase masyarakat yang korupsi di dunia.⁴ Sebenarnya jika ditelaah lebih lanjut upaya-upaya yang bersifat yudisial ini terbukti kurang dalam membangkitkan kesadaran terhadap perbuatan tidak baik bagi individu yang gemar korupsi, sebab di dalam dirinya sudah tertanam pola pikir yang *matearilistis* dan *egoistis*. Oleh sebab itu alih-alih terus memperbaharui sistem hukum terkait korupsi, ada baiknya untuk memperbaiki hal-hal kecil yang dapat menyebabkan individu memiliki keinginan untuk korupsi. Salah satunya adalah pembenahan terhadap pendidikan karakter yang didukung pula dengan pendidikan anti korupsi.

Sebagaimana tercatat dengan rapi pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan setiap pelajar yang menimba ilmu

² Kristiono, N. (2018). PENANAMAN KARAKTER ANTI KORUPSI MELALUI MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG. *Hibualamo : Seri Ilmu-ilmu Sosial dan Kependidikan Vol. 2, No. 2*, halaman 52

³ Ibid

⁴ Suryani, I. (2013). PENANAMAN NILAI ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAUPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN KORUPSI. *Jurnal Visi Komunikasi/Volume XII, No. 02, November*, halaman 309

dimanapun haruslah memiliki karakter dan moral sebagaimana tujuan pendidikan nasional itu sendiri.⁵ Maka dari itu pengembangan pendidikan karakter dalam pendidikan anti korupsi ini tentunya dapat menjadi salah satu upaya pencegahan korupsi yang paling tepat demi mdatangkan cita-cita para pendahulu dengan memberikan kecerdasan berbudi bagi masyarakat bangsa. Pendidikan anti korupsi ini merupakan suatu upaya pencegahan dini yang nantinya dapat berpengaruh besar bagi perkembangan korupsi di Indonesia, sebab pendidikan anti korupsi ini tidak hanya berfokus membuat individu untuk tidak melakukan aksi korupsi kedepannya, namun juga dibekali dengan pendalaman karakter yang dapat membuat individu menguasai pengkarakteran yang harus dipunyai seperti paham akan konsekuensi dan reaktif terhadap keadaan di sekitarnya.

Pendalaman karakter ini sepatutnya terlaksana dalam perguruan tinggi, sebab sebenarnya pengenalan pendidikan karakter telah dilaksanakan kepada individu dari jenjang pendidikan terendah, oleh sebab itu sebagai tempat berkumpulnya para mahasiswa, perguruan tinggi digunakan sebagai tempat pendalaman karakter yang dikemas dalam model pendidikan anti korupsi. Pendalaman karakter ini akan digunakan sebagai sarana untuk membentuk mahasiswa yang bercorakkan karakter kebangsaan yang otentik dan bulat dengan berdasar kebangsaan, agar tidak menimbulkan sikap-sikap korupsi. Selain itu model Pendidikan Anti Korupsi yang dilakukan di dalam Perguruan Tinggi ini akan mengacu pada program *problem based learning* dengan mengedepankan karakter sebagai bahan utama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam proses pembelajaran, serta memberikan pendidikan terkait nilai-nilai yang perlu ditanamkan untuk terhindar dari tindakan korupsi. Dengan mengadakan model *problem based learning* dalam pendidikan anti korupsi membuat tenaga pendidik dapat dengan mudah menelaah kemampuan mahasiswa dalam menangani suatu permasalahan dengan tidak melakukan penyalahgunaan wewenangnya sebagai mahasiswa untuk menangani masalah tertentu, atau melihat sikap-sikap yang dimiliki mahasiswa seperti bertanggung-jawab, atau nilai moral untuk menghadapi masalah tertentu.

Melalui elaborasi deskripsi sebelumnya, dapat dikupas sebuah dasar bahasan yang berupa : (1) Bagaimana Pendalaman Pendidikan Karakter dapat Berpengaruh dalam Pencegahan Korupsi? (2) Bagaimana Kebijakan daripada Pendidikan Annti Korupsi yang telah dilaksanakan pada Perguruan Tinggi?

METODE PENELITIAN

Menyinggung arah daripada penelitian ini adalah untuk mengupas dan menangkap upaya daripada suatu pendalaman pendidikan karakter dalam model pendidikan antii korupsi

⁵ Nurdyansyah. (2015). Model Social Reconstruction Sebagai Pendidikan Anti-Korupsi Pada Pelajaran Tematik di Madrasah Ibtida'iyah Muhammadiyah 1 Pare. *HALAQA: Jurnal Pendidikan dan Keislaman Vol. 14 (No.1), April* , halaman 14

yang dilaksanakan di perguruan tinggi dalam mencegah timbulnya sikap-sikap korupsi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Nana Sudjana dan Ibrahim dalam kutipan yang menjelaskan bahwa salah satu metode dalam penelitian yaitu deskriptif merupakan deskripsi daripada suatu penelitian yang memiliki arah untuk mendeskripsikan sesuatu objek atau rambu, insiden, maupun perihal yang terjadi sehingga dapat digambarkan dengan analisis kata. Dalam penelitian ini analisis yang diberikan berupa penjelasan mengenai pendalaman pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi, serta menjelaskan secara rinci mengenai pengaruh daripada pendalaman karakter dalam model pendidikan anti korupsi untuk mencegah terjadi korupsi bagi mahasiswa.

Data dan analisis yang diperoleh untuk melengkapi penelitian ditujukan melalui suatu studi pustaka yang mempergunakan bahan karya buku, jurnal, dan pendapat para ahli, dimana studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan ketajaman pemikiran untuk menganalisis masalah dan fenomena yang diangkat dalam penelitian ini melalui sumber-sumber tertulis. Studi kepustakaan ini dilakukan sebagai penunjang untuk memperdalam kajian yang diambil dalam penelitian ini, sehingga dapat diperoleh pemecahan masalah dan dapat dijadikan sebagai landasan berpikir mengenai pencegahan korupsi dengan melakukan pendalaman karakter melalui model pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan pada Perguruan Tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pendalaman Karakter dalam Model Pendidikan Anti Korupsi untuk Mencegah Munculnya Sikap-sikap Korupsi di Perguruan Tinggi

Karakter dianggap penting dimulai sejak manusia ada di bumi ini, hal ini sebab karakter dapat menjadi penentu sikap orang lain terhadap diri sendiri. Karakter sebenarnya dapat terbentuk semenjak manusia masih berada di dalam kandungan, individu yang masih ada di dalam kandungan dapat merekam segala emosi ibunya sehingga akan berpengaruh terhadap karakter anak yang dikandungnya. Lalu muncul pemikiran bahwa karakter tidak dapat diubah sebab hal ini merupakan bawaan diri semenjak lahir di dunia, namun pemikiran ini tentunya salah. Sebab karakter manusia tentu dapat dibentuk melalui sebuah pendidikan yang didapatkan sejak usia dini, alasan untuk memanifestasikan individu sebagai manusia yang sangat superior dan esensial adalah manusia dengan mudah untuk meniru dan mengaplikasikan hal-hal yang telah dipelajarinya, termasuk pendidikan karakter ini.

Pendidikan karakter ini tentunya haruslah didapatkan pada semua jenjang pendidikan yang akan diperoleh oleh masing-masing individu, namun perlu ditekankan kembali adanya pendalaman karakter demi mewujudkan karakter yang berintegritas dan baik. Pendalaman karakter ini dapat dilakukan di perguruan tinggi, sebab perguruan tinggi merupakan tempat pendidikan bagi individu dalam proses peralihan dari remaja kepada dewasa awal, sehingga diperlukan kembali pendalaman karakter agar tidak memunculkan sikap-sikap yang melanggar kaidah moral, contohnya adalah sikap-sikap korupsi. Korupsi sangat rentan terjadi pada perguruan tinggi sebab mahasiswa yang masih dalam proses peralihan ini mulai diberikan kebebasan untuk menentukan kebijakan dan tanggung jawab yang besar dalam organisasi ataupun perkumpulan tanpa didampingi dengan seksama oleh

tenaga pendidik lagi. Sehingga sangat memungkinkan akan muncul pemikiran-pemikiran untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan, maupun korupsi dalam bentuk lain.

Mahasiswa sebagai *agen of change* ini tentunya harus memiliki karakter yang kuat untuk menumbuhkan sikap anti korupsi, oleh sebab itu diperlukan adanya pendidikan karakter anti korupsi di perguruan tinggi. Mahasiswa harus memahami juga berkomitmen untuk mendapatkan Pendidikan Karakter dalam Anti Korupsi ini sebagai landasan kerakyataan untuk menyanjung setiap kepunyaan dari individu lainya, bertanggung-jawab, memiliki sikap tulus, melakukan tindakan sesuai dengan kaidah, dan memiliki karakter serta kepribadian yang berintegritas.⁶ Pendidikan anti korupsi ini nantinya akan membentuk pribadi individu yang memiliki kaidah yang berdasar moral sebagai elemen dari pendalaman karakter yang dibentuk pada saat berada di jenjang pendidikan.

Pentingnya Pendidikan karakter anti korupsi di Perguruan tinggi ini sebab, para mahasiswa tidak bisa meluluh-lantahkan segala perbuatan Korupsi melalui jalan penindakan yang dalam hal ini merupakan kewenangan dari aparat penegak hukum, satu-satunya jalan yang paling mudah diaplikasikan mahasiswa dalam hal ini adalah membekali diri lewat karakter anti korupsi yang didapati dalam Pendidikan pada Perguruan tinggi, untuk itu mahasiswa dapat diharapkan memiliki peran sebagai motor penggerak yang dapat memberi pengaruh dan perubahan anti korupsi di masyarakat. Dengan adanya pendalaman karakter anti korupsi ini dapat membuat mahasiswa kembali sadar akan bahayanya sikap korupsi bagi kepentingan umum.

Mengutip pendapat Biyanto dalam Agus Wibowo yang mengatakan bahwa pendidikan anti korupsi sangat penting diaplikasikan dalam setiap jenjang pendidikan adalah, yang *pertama* dunia pendidikan merupakan sarana yang dapat dipergunakan untuk memberikan suatu pengetahuan dalam pemberian klarifikasi dan penjelasan terhadap kesalahpahaman mengenai upaya pemberantasan korupsi, karena banyak individu yang melihat upaya pemberantasan korupsi ini hanyalah wacana karena praktek korupsi masih menjamur hingga saat ini. *Kedua*, jaringan yang dimiliki dalam dunia pendidikan sangat kuat sehingga dapat membentuk gerakan anti korupsi yang massif, lalu yang *ketiga* mayoritas pelaku tindak korupsi merupakan seseorang dengan latar pendidikan tinggi atau sampai pada pendidikan di perguruan tinggi, hal ini menjadi tanda tanya besar karena seharusnya seseorang yang telah menempuh jenjang pendidikan tinggi seharusnya memiliki karakter anti korupsi yang kuat.⁷

Argumentasi ini menguatkan bahwa pendalaman karakter anti korupsi sangat diperlukan salah satunya perlu diaplikasikan dalam perguruan tinggi, karena melihat latar belakang pendidikan koruptor saat ini hampir seluruhnya memiliki pendidikan hingga perguruan tinggi. Hal ini mengisyaratkan bahwa kurangnya karakter yang kuat dalam menangani benih sikap korupsi yang muncul saat individu tersebut dalam proses peralihan,

⁶Noor, R.S.(2020). Pendidikan Karakter Anti Korupsi Sebagai Bagian dari Upaya Pencegahan Dini Korupsi di Indonesia. *Morality, Jurnal Ilmu Hukum Juni, Volume 6 Nomor 1*, halaman 65

⁷ Asmorojati, A. W. (2017). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia . *The 6th University Research Colloquium, Universitas Muhammadiyah Magelang* ,halaman 496

sehingga kurangnya rasa hormat terhadap sesuatu hal tidak lagi penting bagi orang-orang yang telah melakukan korupsi. Hal ini membuktikan bahwa pendalaman karakter melalui pendidikan anti korupsi sangat penting dilakukan pada masa perguruan tinggi, sebab dengan membentuk karakter individu yang lebih bulat dan konsisten diperlukan suatu badan yakni perguruan tinggi yang dapat memfasilitasi adanya pendidikan untuk mencegah munculnya benih sikap korupsi di kemudian hari.

Model Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi yang Terdapat di Perguruan Tinggi

Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi ini bertujuan tentunya untuk membekali mahasiswa sebagai agen pembaruan dalam masyarakat dengan pendalaman karakter anti korupsi, dana upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi yang tepat. Sehingga mahasiswa dapat mempunyai dorongan didalam dirinya untuk menghindari sikap-sikap korupsi nantinya, sebenarnya pemerintah telah membuat kebijakan untuk pelaksanaan Pendidikan anti korupsi khususnya di Perguruan tinggi secara massif. Hal ini dibuktikan dalam keluarnya surat edaran No. 1016 /E /T / 2012 yang dimunculkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengisyaratkan pada semua bagian dari Perguruan tinggi negeri dan Perguruan tinggi Swasta untuk mengimplementasikan Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Penerbitan surat ini mengacu kepada Instruksi dari Presiden Republik Indonesia No, 17 Tahun 2011 terkait Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.⁸

Keluarnya kebijakan tersebut menandakan bahwa pemerintah telah memberikan dukungan dan kewenangan kepada Perguruan tinggi untuk mengaplikasikan Pendidikan anti korupsi sebagai upaya pencegahan agar generasi penerus bangsa dibekali dengan pendidikan yang kuat sehingga dapat terbentuk pola pikir yang berintegritas. Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi harus melalui berbagai macam metode agar penguasaan pendalaman karakter anti korupsi lebih tepat sasaran kepada mahasiswa. Dalam pemahaman yang dipunyai masyarakat bangsa Indonesia bahwa setiap individu yang menduduki bangku di perguruan tinggi sudah memasuki fase dewasa awal, sehingga pendidikan karakter anti korupsi ini dimungkinkan tidak terlalu digubris oleh para mahasiswa, sebab tak sedikit mahasiswa yang menganggap bahwa hal tersebut telah didapatkannya di jenjang pendidikan sebelumnya atau memang tidak adanya ketertarikan untuk memperdalam karakter anti korupsinya.

Maka dari itu diperlukan sebuah model pendidikan yang sesuai dengan perkembangan kognitif umumnya mahasiswa, sehingga dapat memunculkan konsistensisasi dalam melakukan pendalaman karakter anti korupsi yang diberikan dalam perguruan tinggi. Sebenarnya terdapat banyak model ataupun metode yang dapat digunakan untuk memberikan pendidikan anti korupsi ini kepada mahasiswa dengan cara yang mudah, contohnya dengan mengadakan sosialisasi atau seminar-seminar anti korupsi yang dapat di datangi oleh para mahasiswa. Namun, kembali lagi hal ini tentunya membuat mahasiswa

⁸ Kadir, Y. (2018). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi . *Gorontalo Law Review* Volume 1, Nomor 1, halaman 34

menjadi jenuh sehingga sasaran dari tujuan pendidikan anti korupsi itu sendiri tidak terlaksana dengan baik.

Mengenai macam-macam model kebijakan Pendidikan anti korupsi yang dapat diaplikasikan di perguruan tinggi adalah .⁹

1. Diskusi dalam Kelas

Diskusi ini tentunya sudah sangat umum dilakukan dalam setiap pembelajaran di kelas oleh tenaga pendidik, namun ini dapat digunakan sebagai bagian daripada model untuk melakukan pemberian karakter anti korupsi bagi para mahasiswa/i. Contohnya dengan melakukan presentasi model analisis kasus korupsi yang terjadi di area perguruan tinggi dengan upaya-upaya pencegahannya. Sehingga dengan menciptakan diskusi aktif mengenai korupsi ini para mahasiswa dapat membuka pola pikir terkait bahaya yang ditimbulkan dari korupsi itu sendiri bagi kepentingan umum.

2. Penelitian

Penelitian ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang telah memasuki jenjang pendidikan perguruan tinggi, sebab penelitian merupakan salah satu cara belajar yang diterapkan mahasiswa. Sehingga melalui penelitian ini dapat dengan mudah untuk menyisipkan pendidikan anti korupsi di dalamnya, penelitian ini bertujuan untuk membuka pola pikir mahasiswa agar peka terhadap kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya termasuk kasus korupsi yang ada di sekitar perguruan tinggi.

3. Pembelajaran dalam Proyek

Pembelajaran dengan menggunakan proyek sebagai objek dapat menarik minat mahasiswa dalam memahami suatu hal tertentu, dengan membuat suatu proyek yang ada kaitannya dengan korupsi dapat membuat mahasiswa melakukan banyak research terhadap pendidikan anti korupsi, sehingga dengan membuat proyek tersebut mahasiswa dapat mengaplikasikan sendiri pendidikan anti korupsi yang telah didapatkannya.

4. *Problem Based Learning*

Dalam memberikan pendidikan karakter anti korupsi diperlukan pula studi kasus dan masalah agar pola pikir mahasiswa kembali terbuka terhadap permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi, salah satunya permasalahan korupsi. Sehingga mahasiswa dapat menumbuhkan sikap anti korupsi dan memberikan upaya terbaiknya sebagai mahasiswa untuk mendorong masyarakat agar terhindar dari perilaku korupsi.

KESIMPULAN

⁹ Kristiono, N. (2018). PENANAMAN KARAKTER ANTI KORUPSI MELALUI MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG. *Hibualamo : Seri Ilmu-ilmu Sosial dan Kependidikan Vol. 2, No. 2*, halaman 55

Korupsi merupakan kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian banyak pihak, namun dapat menguntungkan diri sendiri. Karakter egoistik ini tidak serta merta tiba-tiba muncul, tentunya banyak pengaruh yang mendasari, salah satunya kurangnya pendalaman karakter yang didapatkannya dalam masa-masa peralihan di hidupnya. Walaupun pemerintah Indonesia sudah mencoba untuk melakukan pembenahan terhadap sistem hukum agar tidak terjadi kasus korupsi yang kian merajalela. Sebenarnya jika ditelaah lebih lanjut upaya-upaya yang bersifat yudisial ini kurang memberikan signifikansi efek kepada pelaku, sebab di dalam dirinya sudah tertanam pola pikir yang *materalistis* dan *egoistis*. Oleh sebab itu alih-alih terus memperbaharui sistem hukum terkait korupsi, ada baiknya untuk memperbaiki hal-hal kecil yang dapat menyebabkan individu memiliki keinginan untuk korupsi. Salah satunya adalah pembenahan terhadap pendidikan karakter yang didukung pula dengan pendidikan anti korupsi.

Pendalaman karakter anti korupsi sangat diperlukan salah satunya perlu diaplikasikan dalam perguruan tinggi, karena melihat latar belakang pendidikan koruptor saat ini hampir seluruhnya memiliki pendidikan hingga perguruan tinggi. Hal ini mengisyaratkan bahwa kurangnya karakter yang kuat dalam menangani benih sikap korupsi yang muncul saat individu tersebut dalam proses peralihan, sehingga kurangnya rasa hormat terhadap sesuatu hal tidak lagi penting bagi orang-orang yang telah melakukan korupsi. Hal ini membuktikan bahwa pendalaman karakter melalui pendidikan anti korupsi sangat penting dilakukan pada masa perguruan tinggi, sebab dengan membentuk karakter individu yang lebih bulat dan konsisten diperlukan suatu badan yakni perguruan tinggi yang dapat memfasilitasi adanya pendidikan untuk mencegah munculnya benih sikap korupsi di kemudian hari.

SARAN

Dengan maraknya kasus korupsi di Indonesia mengisyaratkan kurangnya pendalaman karakter melalui pendidikan anti korupsi, seharusnya para *stakeholders* kembali menggalakan program pendidikan anti korupsi ini agar berlangsung dengan efektif khususnya di perguruan tinggi agar generasi penerus bangsa dapat mencerminkan karakter anti korupsi dan terhindar dari benih-benih sikap korupsi nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmorojati, A. W. (2017). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia . *The 6th University Research Colloquium, Universitas Muhammadiyah Magelang* , 491-498.
- Kadir, Y. (2018). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi . *Gorontalo Law Review Volume 1, Nomor 1* , 25-38.
- Kristiono, N. (2018). PENANAMAN KARAKTER ANTI KORUPSI MELALUI MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG. *Hibualamo : Seri Ilmu-ilmu Sosial dan Kependidikan Vol. 2, No. 2* , 51-56.

Noor, R. S. (2020). PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENCEGAHAN DINI KORUPSI DI INDONESIA .
Morality : Jurnal Ilmu Hukum Juni, Volume 6 Nomor 1 , 55-73.